WARTA PPKS 2005, Vol. 13 (1) : 1 - 9

KAITAN DAYA DUKUNG WILAYAH DAN DAYA TARIK PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI AREAL BUKAAN BARU

Oleh

Luqman Erningpraja, A. Kurniawan, dan H. Santoso

Perkembangan areal perkebunan kelapa sawit tumbuh dengan cepat sejak 1970, terutama pada tahun 80-an dimana pemerintah giat mengembangkan tanaman perkebunan. Selain itu pengembangan tanaman kelapa sawit dilatarbelakangi oleh pencarian sumber minyak makan pengganti minyak kelapa yang diprediksikan tidak akan mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Titik kritis perkembangan areal kelapa sawit Indonesia terjadi dalam periode 80-an. Dalam kurun waktu 1970-1979, luas areal berkembang dengan laju sekitar 6,9%/tahun, sedangkan pada 1980-1989 laju tersebut naik menjadi 12,7%/tahun dan sedikit turun menjadi 10,1%/tahun pada 1990-1999 dan terus menurun menjadi 7,18%/tahun pada 2000-2004. Laju pertumbuhan perkebunan kelapa sawit Indonesia di masa mendatang diproyeksikan akan terus menurun. Dalam 2005-2010 laju pertumbuhan diproyeksikan tidak lebih dari 5%/tahun, turun menjadi ±3%/tahun dalam 2011-2015 dan anti klimaks menjadi ±1,3%/tahun dalam 2016-2019.

Terdapat indikasi bahwa lahan-lahan potensial untuk calon areal bukaan baru memiliki tingkat koreksi yang lebih tinggi baik dari aspek teknis maupun daya dukung wilayah yang berkorelasi negatif dengan daya tarik pengembangan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan hasil kajian sementara menunjukkan bahwa: (a) lahan-lahan potensial sebagai calon areal bukaan baru didominasi oleh KKL potensial S3 yaitu sekitar 86% dari total luas areal dan 14% sisanya memiliki KKL potensial S2, (b) secara teknis pada lahan-lahan tersebut diperlukan beberapa teknologi tambahan antara lain berupa bangunan pengawetan tanah dan air seperti teras kontur, tapak kuda, rorak dan tapak timbun dan bangunan tata air pada lahan gambut. Tambahan paket teknologi berarti tambahan biaya investasi, (c) berdasarkan lokasi, maka sentra-sentra baru perkebunan kelapa sawit mengarah pada Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur.

PENDAHULUAN

Bagi Indonesia, kelapa sawit telah menjadi komoditi sub sektor perkebunan yang memiliki peranan penting bagi perekonomian. Prospek usaha yang cerah, harga produk yang kompetitif, dan industri berbasis kelapa sawit yang beragam dengan skala usaha yang fleksibel, telah menjadikan banyak perusahaan dalam berbagai skala maupun petani yang berminat untuk membangun industri kelapa sawit, mulai dari kebun hingga industri hilir.

Menilik kembali sejarah perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia, diketahui bahwa perkebunan

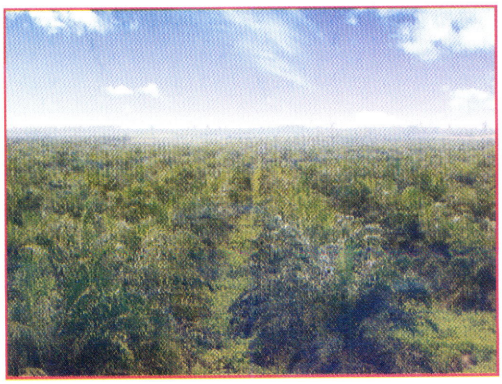

Gambar 1. Hamparan kebun kelapa sawit

kelapa sawit modern dimulai dari pantai timur Sumatera pada 1911 seluas ±500 ha. Hingga 1916, luas areal kelapa sawit hanya 1.272 ha dan kemudian terus bertambah secara eksponensial mencapai 110 ribu ha pada 1940. Akibat pergolakan politik pada kurun waktu 1940-1966 relatif tanpa pertambahan areal dan pada 1967 luas areal kelapa sawit adalah 106 ribu ha yang hampir sama dengan luas pada 1940. Perkembangan areal perkebunan kelapa sawit tumbuh dengan cepat sejak 1970, terutama pada tahun 80-an dimana pemerintah giat mengembangkan tanaman ekspor perkebunan. Selain itu pengembangan tanaman kelapa sawit dilatarbelakangi oleh pencarian sumber minyak makan pengganti minyak kelapa yang diprediksikan tidak akan mencukupi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2004, luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia diproyeksikan mencapai 5,51 juta ha (2,4). Grafik perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit dalam periode 1916-2004 disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. menunjukkan bahwa titik kritis perkembangan areal kelapa sawit Indonesia terjadi dalam periode 80an. Dalam 1970-1979, luas areal berkembang dengan laju sekitar 6,9%/tahun. Dalam 1980-1989 laju tersebut naik menjadi 12,7%/tahun, sedikit turun menjadi 10,1%/tahun dalam 1990-1999 dan terus menurun menjadi 7,18%/tahun dalam 2000-2004. Laju pertumbuhan perkebunan kelapa sawit Indonesia di masa mendatang diproyeksikan akan terus menurun. Dalam 2005-2010 laju pertumbuhan diproyeksikan tidak lebih dari 5%/tahun, turun menjadi ±3%/tahun dalam 2011-2015 dan anti klimaks menjadi ±1,3%/tahun dalam 2016-2019 (3). Laju pertumbuhan luas areal kelapa sawit Indonesia 1970-2004 dan proyeksi laju pertumbuhan periode 2005-2019 disajikan pada Gambar 3.

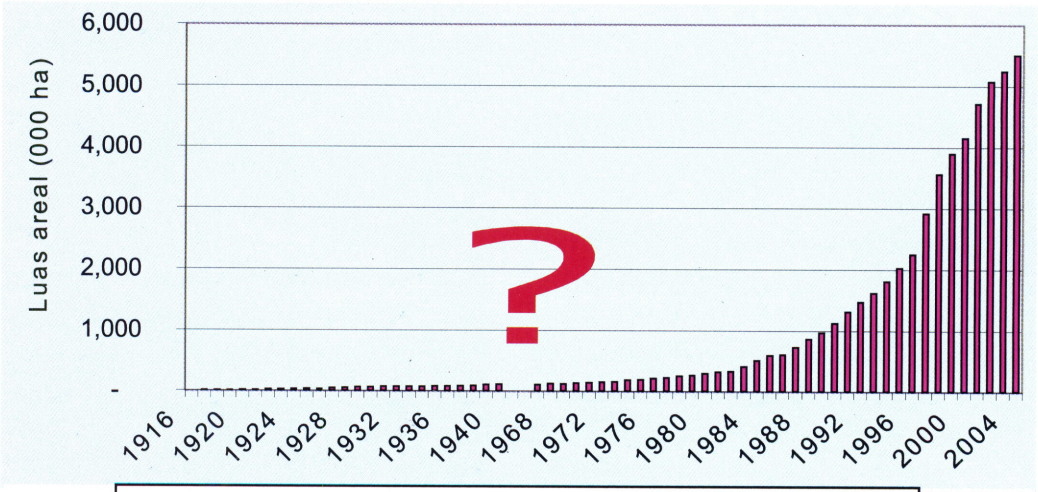

Gambar 2. Perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia 1916-2004

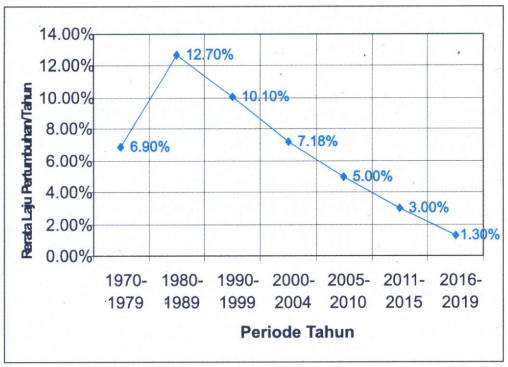

Gambar 3. Laju pertumbuhan luas areal kelapa sawit Indonesia periode tahun 1970-2004 dan proyeksi laju pertumbuhan periode 2005-2019

Laju pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang menurun pada akhir tahun 90-an merupakan imbas dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Tanda-tanda pemulihan ekonomi di akhir tahun 2001 membawa angin segar bagi para pelaku usaha untuk kembali melakukan investasi termasuk di perkebunan kelapa sawit. Namun, mengapa laju pertumbuhan perkebunan kelapa sawit Indonesia tetap menurun? Selain kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih yang antara lain ditandai dengan tingkat inflasi >10% dan tingkat suku bunga pinjaman bank yang belum mendukung usaha perkebunan (>16%/tahun), terdapat indikasi bahwa lahan-lahan yang berpotensi untuk areal bukaan baru memilki tingkat koreksi yang semakin tinggi dari aspek teknis maupun dari aspek daya dukung wilayah. Kedua hal tersebut akan berkorelasi dengan tingkat kelayakan usaha yang pada akhirnya menentukan daya tarik pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Artikel ini merupakan hasil pra penelitian mengenai faktor-faktor dari aspek daya dukung wilayah yang diduga menjadi faktor koreksi daya tarik pengembangan perkebunan kelapa sawit di areal bukaan baru.

II. KAJIAN DAYA DUKUNG WILAYAH DALAM STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Kajian daya dukung wilayah dalam sebuah studi kelayakan pembangunan perkebunan kelapa sawit ditujukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan wilayah mendukung rencana proyek.

Kajian daya dukung wilayah didasarkan pada:

- Data ketersediaan lahan yang sesuai untuk budidaya kelapa sawit.
- Data ketersediaan sumberdaya alam non lahan.
- Data ketersediaan prasarana dan sarana penunjang industri seperti infrastruktur jalan dan transportasi, telekomunikasi dan enerji hingga tempat pengolahan hasil.
- Data kondisi sosial ekonomi termasuk ketersediaan dan karakteristik sumberdaya manusia.
- Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pembangunan industri kelapa sawit.

Data ketersediaan lahan yang sesuai untuk budidaya kelapa sawit merupakan hal pokok yang menentukan seberapa besar potensi luas kebun kelapa sawit yang dapat dibangun. Sementara itu kelas

kesesuaian lahan (KKL) yang diperoleh dari hasil survei kesesuaian lahan akan menentukan potensi produksi yang dapat dicapai dengan asumsi melaksanakan pedoman teknis yang direkomendasikan. Selain menentukan potensi produksi, data karakteristik lahan yang diterangkan secara detail dalam klasifikasi kelas lahan menyiratkan biaya investasi yang akan diperlukan.

Terdapat tiga kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit yaitu S1, S2 dan S3. Lahan S1 merupakan lahan yang paling sesuai untuk tanaman kelapa sawit dan memberikan potensi produksi paling besar dan lahan S3 memberikan potensi produksi paling rendah dibanding dua kelas lahan lainnya. Sementara itu dari keperluan biaya investasi dengan asumsi pada lokasi yang sama, maka semakin rendah KKL yang diperoleh pada umumnya memerlukan biaya investasi lebih tinggi akibat penambahan teknologi yang harus diterapkan dalam pembangunan kebun. Sebagai ilustrasi, bila dua bidang lahan yang berdekatan hanya dibedakan karena topografinya, datar dan berbukit, maka pada lahan yang berbukit akan memerlukan pembangunan bangunan pengawetan tanah berupa teras kontur yang tentunya memerlukan biaya tambahan yang tidak perlu dilakukan pada lahan datar.

Berdasarkan pada potensi luas kebun yang dapat dibangun dan potensi produksi lahan maka dapat diketahui kapasitas pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) yang diperlukan untuk menampung hasil produksi kebun. Terkait dengan tempat penampungan hasil produksi kebun, maka secara garis besar dapat dikelompokan ke dalam dua cara, yaitu 1. pembangunan PKS baru sebagai satu paket pembangunan, **atau** 2. memanfaatkan PKS-PKS yang berada di sekitar calon lokasi proyek yang dilengkapi dengan kajian kecukupan daya tampung PKS akibat penambahan pasokan dari kebun yang akan dibangun.

Data sumberdaya alam antara lain diperlukan untuk melihat ketersediaan sumber dan kualitas air, nilai ekonomi dari vegetasi yang ada di areal proyek yang juga menentukan biaya pembukaan lahan, ada/tidaknya banjir di lokasi proyek, ada/tidaknya pemukiman di areal proyek, keadaan fisik lahan seperti topografi, geologi, jenis dan status lahan, serta kesesuaian rencana proyek dengan rencana tataguna lahan.

Data prasarana dan sarana penunjang industri yang sudah ada dan yang direncanakan, diperlukan untuk menilai kecukupannya mendukung proyek dan untuk menetapkan sarana dan prasarana tambahan yang perlu dibangun. Termasuk juga di dalam item ini adalah tempat penampungan hasil produksi kebun.

Data keadaan sosial ekonomi diperlukan terutama untuk mengetahui penerimaan masyarakat setempat atas rencana proyek dan melihat ketersediaan tenaga kerja terutama untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan kebun,

produksi dan tenaga adminstrasi.

Mata pencaharian dan pendapatan penduduk diperlukan untuk menetapkan apakah tenaga yang tersedia akan tertarik untuk bekerja di kebun kelapa sawit. Apabila pendapatan masyarakat tinggi, maka akan sulit mendapatkan tenaga kerja. Tingkat pendidikan dan mata pencaharian menentukan kualitas sumber daya manusia yang tersedia disamping "karakteristik" SDM. Survei ekonomi juga diperlukan untuk mendapatkan harga bahan-bahan dan upah buruh yang diperlukan dalam investasi.

Secara ringkas kajian daya dukung wilayah didukung oleh:

1. Peta kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit
2. Data dan peta *land use* kabupaten tempat lokasi penelitian
3. Data luas perkebunan kelapa sawit yang telah dibangun
4. Data hak guna usaha yang telah dikeluarkan untuk perkebunan kelapa sawit
5. Data areal arahan lokasi bupati untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit
6. Data kependudukan dan penerimaan masyarakat terhadap rencana proyek
7. Data infrastruktur dan alat transportasi yang tersedia dan yang direncanakan
8. Data pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) dan industri hilir lanjutan yang telah berdiri
9. Data ketersediaan pelabuhan terminal CPO dan instalansi tanki timbun/ITT (Gambar 4)
10. Data harga input produksi
11. Potensi pasar dan harga produk
12. Kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan industri kelapa sawit, antara lain:
    - Upah minimum regional
    - Perizinan pembangunan industri kelapa sawit
    - Retribusi daerah yang diberlakukan
    - Kebijakan fiskal lainnya

III. LOKASI LAHAN POTENSIAL

Pusat Penelitan Tanah dan Agroklimat (1997) mengidentifikasi sekitar 18 juta hektar lahan yang sesuai untuk pengembangan kelapa sawit di beberapa provinsi yang pada awalnya memang direncanakan sebagai pusat pengembangan kelapa sawit seperti disajikan pada Tabel 1. Namun, Departemen Kehutanan menyatakan bahwa „hanya" sekitar 9,8 juta hektar lahan kehutanan yang dapat dikonversi untuk perkebunan (1).

Merunut ulang lokasi lahan yang berpotensi sebagai areal bukaan baru maka 73,32% dari lahan-lahan tersebut berada di kawasan Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur dan sisanya 26,68% berada di Indonesia Bagian Barat, terutama Riau dan Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil kajian sementara

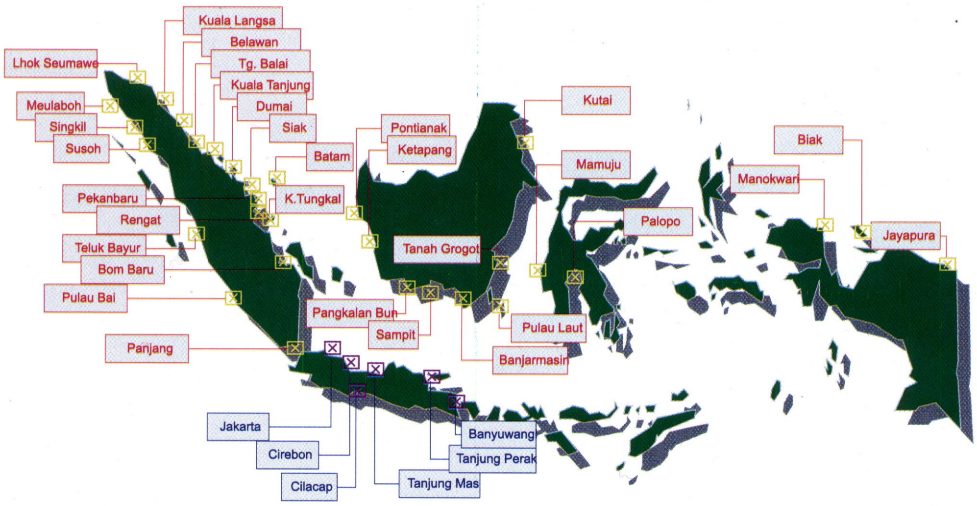

Gambar 4. *Oil Traffic* : CPO dan Olein (disadur dari Yuddy Sulaeman, 2003 dalam Buana 2004)

terhadap lahan-lahan potensial yang dapat dijadikan sebagai calon areal bukaan baru, diperoleh kesimpulan bahwa:

i. Lahan-lahan potensial tersebut didominasi oleh KKL potensial S3 yaitu sekitar 86% dari total luas areal dan 14% sisanya memiliki KKL potensial S2. Pada tanah mineral umumnya memiliki faktor pembatas berupa topografi, tekstur tanah dan kedalaman solum tanah dan drainase. Sementara pada tanah gambut dan rawa (terutama di Riau dan pulau Kalimantan) memiliki faktor pembatas berupa kedalaman gambut, drainase dan tingkat kemasaman tanah.

ii. Secara teknis pada lahan-lahan tersebut diperlukan beberapa teknologi tambahan antara lain berupa bangunan pengawetan tanah dan air seperti teras kontur, tapak kuda, rorak dan tapak timbun dan bangunan tata air pada lahan gambut. Tambahan paket teknologi berarti tambahan biaya investasi. Hal ini juga sebagai salah satu faktor peningkatan biaya investasi kebun kelapa sawit selain kenaikan harga-harga input produksi.

iii. Berdasarakan lokasi, maka sentra-sentra baru perkebunan kelapa sawit mengarah pada Indonesaia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur. Diketahui bahwa secara umum pembangunan di Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur relatif lebih lambat dibandingkan dengan Indonesia Bagian Barat. Beberapa fenomena yang kurang kondusif terhadap daya tarik investasi, antara lain:

a) Aksesibilitas menuju lokasi yang relatif sulit mengingat

Tabel 1. Luas lahan potensial untuk pengembangan kelapa sawit (ha)

No.	Provinsi	Luas (ha)
1.	Sumatera Utara	333.700
2.	Riau	973.000
3.	Bengkulu	409.150
4.	Kalimantan Barat	3.283.400
5.	Kalimantan Tengah	3.197.900
6.	Kalimantan Timur	4.221.300
7.	Sulawesi Tengah	164.400
8.	Sulawesi Selatan	196.900
9.	Papua (termasuk Irian Jaya Barat)	5.957.000
Jumlah (ha)		**18.736.750**

Sumber: Puslitanak, 1997 dalam Buana 2004

keterbatasan infrastruktur dan sarana transportasi.

b) Produsen input produksi dominan berada di pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jarak yang jauh ditambah poin a) memberikan konsekuensi berupa harga input produksi yang lebih mahal yang berkorelasi dengan peningkatan biaya untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sama bila dilakukan di Indonesia Bagian Barat.

c) Gambar 4 menunjukkan bahwa sarana penunjang industri yang berupa pelabuhan terminal CPO relatif belum dapat menjangkau seluruh lokasi. Biaya angkut dari tanki timbun PKS menuju pelabuhan relatif mahal. Permasalahan lain terkait dengan terminal CPO yang telah ada, antara lain berupa: jenis kapal yang dapat merapat memiliki kapasitas muat <10.000 ton; beberapa diantaranya belum memiliki instalasi tanki timbun dan hanya berupa terminal curah CPO; kegiatan ekpor CPO masih melalui pelabuhan besar seperti Tanjung Priuk di Jakarta atau ke kapal tanker yang bersauh di laut Jawa. Dengan jalur pelayaran seperti tersebut memberikan harga produk yang diterima adalah lebih rendah dibandingkan harga produk yang diterima di Indonesia Bagian Barat. Hal yang sangat kontras dimana biaya per satuan produk yang dikeluarkan adalah lebih tinggi dibandingkan di Indonesia Bagian Barat.

d) Dari sisi ketersediaan sumberdaya manusia relatif tidak terkendala karena SDM bersifat *mobile* atau dapat didatangkan dari luar lokasi.

e) Menyangkut masyarakat tempatan, secara spesifik memiliki "karakteristik" tersendiri yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pola hidup. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di areal bukaan baru "harus" mampu

beradaptasi dengan karekteristik masyarakat tempatan. Beberapa "biaya" diluar biaya investasi mungkin harus dikeluarkan. Selain itu bila melibatkan masyarakat tempatan sebagai bagian proyek melalui pembangunan kebun plasma, maka pola hubungan inti-plasma yang ditawarkan juga bersifat spesifik lokasi dan tidak dapat dilakukan generalisasi pola inti-plasma.

iv. Dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan industri kelapa sawit relatif baik terlebih di era otonomi hadirnya industri kelapa sawit akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) selain memberikan *multiple effect* yang besar bagi perekonomian daerah dan mendorong percepatan pembangunan daerah.

V. KESIMPULAN

- Laju pertumbuhan perkebunan kelapa sawit Indonesia di masa mendatang diproyeksikan akan terus menurun. Dalam 2005-2010 laju pertumbuhan diproyeksikan tidak lebih dari 5%/tahun, turun menjadi ±3%/tahun dalam 2011-2015 dan anti klimaks menjadi ±1,3%/tahun dalam 2016-2019.
- Terdapat indikasi bahwa lahan-lahan potesial untuk calon areal bukaan baru memiliki tingkat koreksi yang lebih tinggi baik dari aspek teknis maupun daya dukung wilayah yang berkorelasi negatif dengan daya tarik pengembangan perkebunan kelapa sawit.
- Beberapa fenomena yang kurang kondusif terhadap daya tarik investasi, antara lain: (a.) Aksesibilitas menuju lokasi yang relatif sulit mengingat keterbatasan infrastruktur dan sarana transportasi. (b.) Biaya transport input produksi maupun produk relatif mahal; dan (c.) Rendahnya nilai produk mengigat belum efisiensinya jalur pemasaran produk.
- Pembangunan perkebunan kelapa sawit di areal bukaan baru "harus" mampu beradaptasi dengan karekteristik masyarakat tempatan.
- Perlu beberapa kebijakan pemerintah baik pusat mapun daerah untuk meminimalisasi faktor koreksi, seperti: pemberian insentif bagi calon investor dengan penyediaan modal investasi dengan tingkat suku bunga pinjaman rendah, percepatan pembangunan fisik daerah, dan kebijakan fiskal maupun moneter lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Buana*, Lalang. 2004. "*Prospek Pengembangan Kelapa Sawit Di Indonesia*", Tinjauan Ekonomi Industri Kelapa Sawit. Puslit. Kelapa Sawit, Medan.
2. *Ditjenbun. 2003. Statistik Kelapa Sawit Indonesia.* Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian-RI.Jakarta
3. *Kurniawan*, Ambar. 2004. "*Foresight Industri kelapa Sawit*", Puslit. Kelapa Sawit, Medan.
4. *Kurniawan*, Ambar. 2004. "Kaitan Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan Dengan Industri Kelapa Sawit Indonesia", Tinjauan Ekonomi Industri Kelapa Sawit. Puslit. Kelapa Sawit, Medan.

BUKU-BUKU TENTANG KELAPA SAWIT DAPAT DIPESAN MAUPUN BERLANGGANAN DI PERPUSTAKAAN PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT

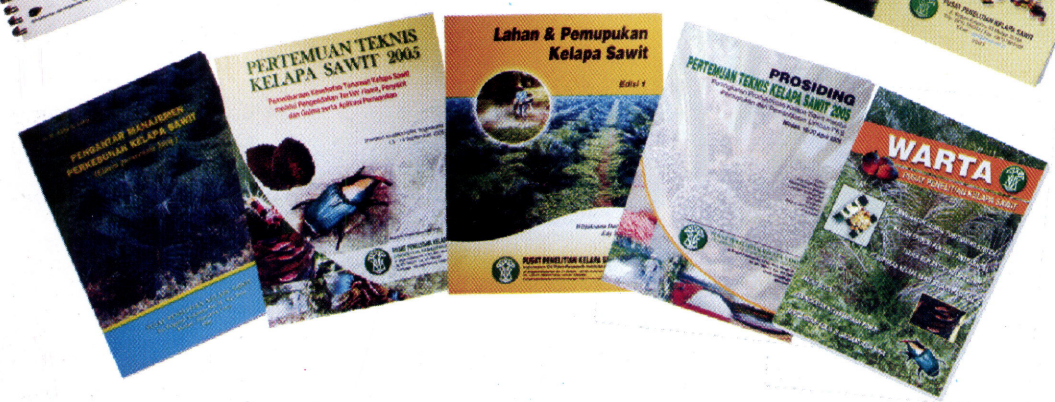

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Perpustakaan Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Jl. Brigjen Katamso No. 51 Kp. Baru Medan, Indonesia
Telp. 061-7862477, Fax : 061 – 7862488
Email : admin@iopri.org, Website : www.iopri.org